

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulannya sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap debitur teknologi finansial berbasis *peer to peer lending* belum memiliki aturan khusus dalam bentuk perundang-undangan. Namun terdapat dalam ketentuan-ketentuan khusus yang diatur berdasarkan perlindungan hukum secara *preventif* dan *represif*. Perlindungan hukum secara *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Pasal 29 POJK tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (PERMEN KOMINFO) tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Kemudian perlindungan *represif* bertujuan untuk untuk menyelesaikan sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

2. Dalam penyelesaian permasalahan antara penerima pinjaman (debitur) dengan penyelenggara *peer to peer lending* yang merupakan bentuk perlindungan hukum secara *represif* sampai saat ini belum ada pilihan hukum yang pasti dalam penyelesaiannya. Namun jika terjadi permasalahan upaya hukum *represif* yang dapat dipilih dalam penyelesaiannya yaitu melalui penyelesaian sengketa disektor jasa keuangan, kemudian juga bisa melalui jalur litigasi, dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Terdapat beberapa model dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Penilaian Ahli, Arbitrase dan Ajudikasi.

## **B. SARAN**

1. Teknologi finansial berbasis *peer to peer lending* ini diperkirakan merupakan sumber perkembangan ekonomi di Indonesia yang sangat berpotensi kedepannya. Sehingga Pemerintah harus segera membentuk peraturan perundang-undangan tersendiri mengenai kegiatan bisnis ini. Karena jika regulasi terkait teknologi finansial ini belum memiliki kedudukan yang jelas seperti saat ini, maka permasalahan-permasalahan yang ada akan sulit untuk dapat diselesaikan, yang dirugikan disini adalah masyarakat (konsumen) sebagai penerima pinjaman/ debitur.

2. Upaya pemerintah untuk segera membentuk perundang-undangan teknologi finansial ini memang sangat mendesak apalagi masyarakat saat ini kebingungan mengenai upaya dalam penyelesaian sengketa teknologi finansial berbasis *peer to peer lending* ini, dikarenakan jalur litigasi yang terkesan ribet dan memakan waktu yang lama dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan pun sulit ditempuh karena terkadang jarak antara para pihak yang sangat jauh.

